KOMUNIKASI DELIBERATIF DAN FRAGMENTASI POSTMODERN: PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU HABERMAS–LYOTARD PADA KASUS KERACUNAN MBG DI SEKOLAH

Reni Dian Anggraini
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
renidian1997@gmail.com

Abstract

This study examines deliberative communication and postmodern fragmentation in the MBG poisoning case in schools through the perspective of the Habermas-Lyotard philosophy of science. The background of this study is the strengthening crisis of public trust in the MBG program after the emergence of various poisoning incidents that gave rise to a narrative battle between the government, media, victims, and society. This study aims, first, to analyze the construction of the MBG poisoning discourse in Indonesia's digital public space. Second, to explain the failure of deliberative communication in the crisis through the perspective of Habermas. And third, to describe the fragmentation of narratives in the MBG debate through the perspective of Lyotard. The method used is a literature study with a critical discourse analysis approach. Data were analyzed through thematic coding of official government narratives, critical public narratives, and digital media responses to identify patterns of knowledge legitimacy and power relations in the MBG discourse. The results show that the MBG poisoning discourse in the digital public space shows tension between official truth claims and the empirical experiences of victims. From Habermas's perspective, the failure of deliberative communication is caused by the dominance of instrumental rationality that excludes equal, transparent, and rational public participation. From Lyotard's perspective, the MBG debate demonstrates the collapse of a single narrative and the emergence of a plurality of competing sub-narratives, thus fragmenting policy legitimacy. This study concludes that restoring the legitimacy of knowledge in MBG policy can only be achieved through deliberative, inclusive, and accountable public communication, accompanied by recognition of the diversity of community experiences and narratives.

Keywords: Hubermas, Lyotard, Deliberative Communication, Postmodern Fragmentation, Legitimacy of Knowledge, MBG

Abstrak

Penelitian ini mengkaji komunikasi deliberatif dan fragmentasi postmodern dalam kasus keracunan MBG di sekolah melalui perspektif filsafat ilmu Habermas–Lyotard. Latar belakang kajian ini ialah menguatnya krisis kepercayaan publik terhadap program MBG setelah muncul berbagai insiden keracunan yang memunculkan pertarungan narasi antara pemerintah, media, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan, pertama, menganalisis konstruksi diskursus keracunan MBG dalam ruang publik digital Indonesia. Kedua, menjelaskan kegagalan komunikasi deliberatif dalam krisis tersebut melalui perspektif Habermas. dan Ketiga, menguraikan fragmentasi narasi dalam perdebatan MBG melalui perspektif Lyotard. Metode yang digunakan ialah studi kepustakaan dengan pendekatan analisis wacana kritis. Data dianalisis melalui koding tematik terhadap narasi resmi pemerintah, narasi kritis masyarakat, dan respons media digital untuk mengidentifikasi pola legitimasi pengetahuan serta relasi kuasa dalam diskursus MBG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskursus keracunan MBG di ruang publik digital memperlihatkan ketegangan antara klaim kebenaran resmi dan pengalaman empiris korban. Dalam perspektif Habermas, kegagalan komunikasi deliberatif disebabkan dominasi rasionalitas instrumental yang menyingkirkan partisipasi publik yang setara, transparan, dan rasional. Dalam perspektif Lyotard, perdebatan MBG menunjukkan runtuhnya narasi tunggal dan munculnya pluralitas narasi kecil yang saling bersaing, sehingga legitimasi kebijakan menjadi terfragmentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemulihan legitimasi pengetahuan dalam kebijakan MBG hanya dapat dicapai melalui komunikasi publik yang deliberatif, inklusif, dan akuntabel, disertai pengakuan atas keberagaman pengalaman dan narasi masyarakat.

Kata Kunci: Hubermas, Lyotard, Komunikasi Deliberatif, Fragmentasi Postmodern, Legitimasi Pengetahuan, MBG

PENDAHULUAN

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan sebuah inisiatif nasional yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada Januari 2025, guna meningkatkan gizi pada anak serta mengurangi kelaparan dikalangan anak sekolah yang kurang mampu.(Hari, Yanggah, and Budiman 2026) Sehingga program ini dijadikan sebagai salah satu inisiatif utama untuk mengatasi keterjangkauan pangan (Julian and Pranata 2025) dalam menyediakan makana bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan. (Caraka et al. 2025) Jika dilihat dari inisatif awal

berupa program makan bergizi gratis ini sangatlah efektif dan juga vital bagi kesejahteraan bangsa. Sebagian besar telah menghilangkan kelaparan serta kekurangan gizi yang bisa dikatakan parah.(Keith-Jennings, Llobrera, and Dean 2019)

Program dalam pemberian makanan gratis ini telah dijalankan secara luas di berbagai lingkungan, termasuk sekolah, pusat komunitas serta daerah yang terkena krisis. Dalam program pemberian makanan gratis berbasis sekolah misalnya, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan asupan nutrisi anak-anak sekaligus mendorong kehadiran di sekolah sehingga meningkatkan kinerja secara kognitif.(Yusriadi Yusriadi 2025) Sebenarnya program ini telah berusaha menunjukkan dampak positif jangka pendek terhadap kesehatan serta pendidikan, akan tetapi program ini justru menjadi hal baru dalam masalah perdebatan dalam hal pangan seperti adanya kasus dalam keracunan makanan di berbagai daerah. Berbagai kasus keracunan massal di berbabagai sekolah, menunjukkan bukan hanya suatu persoalan teknis yang dapat dibicarakan. Akan tetapi tercermin mengenai resiko sistemik yang berpengaruh dari interaksi antara bahaya pangan, tingkatan paparan peserta didik, serta kerentanan kapasitas sekolah, bahkan lemahnya mengenai tata kelola dalam masalaha kebijakan publik.(Syari, Sulistiawati, and Heriani 2026)

Berdasarkan konteks ini perlunya ruang komunikasi secara deliberative serta fragmentasi yang ditawarkan oleh filsuf berupa Jurgen Hubermas dan Francois Lyotard dalam melihat kasus yang lagi maraknya dibicarakan di era sekarang. kritik atas modernitas tidak cukup hanya dengan menunjukkan kerusakannya, seperti yang banyak dilakukan oleh generasi pertama Mazhab Frankfurt. Kritik harus disertai dengan rekonstruksi, bagaimana membangun kembali ruang publik, bagaimana menciptakan prosedur dialog yang adil, dan bagaimana mengembalikan manusia ke dalam proses komunikasi yang lebih manusiawi. (Haikal et al. 2026) Sementara itu, postmodernisme menantang klaim universalitas rasionalitas modern dan membuka dimensi kuasa yang tersembunyi dalam proyek modernitas. rasionalitas modern adalah produk dari praktik kuasa yang menciptakan norma dan deviasi. Pengetahuan, dalam kerangka ini, tidak netral, melainkan sarat dengan strategi legitimasi kekuasaan. Lyotard menambahkan bahwa era postmodern ditandai oleh runtuhnya narasi besar, termasuk rasionalitas universal, dan digantikan oleh narasi-narasi kecil yang lokal, partikular, dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan pengakuan terhadap identitas-identitas marginal dan narasi alternatif yang selama ini disingkirkan oleh struktur dominan. (Nur et al. 2025)

Dalam penelitian sebelumnya sebagian besar cenderung berfokus pada pengintegrasian program makan gratis sebagai upaya dalam memperbaiki gizi, seperti yang ditulis oleh (Hari, Yanggah, and Budiman 2026), (Caraka et al. 2025), (Julian and Pranata 2025). Secara khusus mengkaji model integrasi dalam mengoptimalkan pangan dalam program makanan bergizi gratis serta prinsip-prinsip keberlanjutan dalam makanan bergizi. Dari ketiga temuan tersebut Hari dan Kawan-kawan lebih berfokus kepada model mengoptimalkan pangan rantai pasokan program makanan bergizi gratis untuk mengurangi limbah makanan, sementara Caraka dan Kawan-kawan, lebih berfokus kepada pemetaan protein laut sebagai pendukung program MBG Prabowo-Gibran. Dan Julian Pranata lebih berfokus kepada prinsip-prinsip keberlanjutan dalam makanan bergizi melalui keterbukaan masyarakat aspek ekonomi. Selanjutnya penelitian berupa keracunan makanan bergizi di tulis oleh (Leader et al. 2026) berfokus kepada kasus keracunan makanan program makan bergizi gratis di lihat dari nilai kemanusiaan pada Sila

kedua yang terdapat dalam Pancasila, serta (Ontran Sumantri Riyanto 2025) berfokus bagaimanan menegakan ha katas makanan aman serta sehat dalam studi kasus keracunan pada program makan bergizi gratis dilihat dari tanggungjawab negara. Walaupun penelitian terdahulu sudah berhasil membuktikan efektivitas program makan bergizi gratis sebagai mekanisme dalam masalah memperbaiki gizi pada tingkatan kesehatan, akan tetapi masih berhenti pada level deskriptif serta praktis. Sementara itu, studi ini memberikan konsep baru tentang perlunya komunikasi deliberative serta fragmentasi melalui perspektif dalam filsafat ilmu dalam melihat keracunan MBG yang terjadi di sekolah.

Studi ini hadir untuk menjawab kebutuhan di atas dengan menawarkan lensa konseptual baru yang tidak hanya bersifat deskriptif, namun analitis, serta implikatif. Yang bertujuan untuk membahas tiga permasalahan utama dalam kajian ini: *Pertama*, bagaimana diskursus keracunan MBG terkonstruksi dalam ruang publik digital Indonesia? *Kedua*, bagaimana perspektif Habermas (rasionalitas publik dan etika diskursus) menjelaskan kegagalan komunikasi deliberatif dalam krisis keracunan MBG? *Ketiga*, bagaimana perspektif Lyotard (kondisi postmodern dan fragmentasi naratif) menjelaskan fragmentasi narasi dalam perdebatan MBG? Berdasarkan mekanisme serta pengaplikasian terhadap kasus keracunan MBG yang muncul di berbagai daerah, kajian ini berharap dapat memberikan legitimasi filosofis untuk melihat perlunya ruang dialog bukan hanya sekedar memberikan kritikan tanpa adanya fragmentasi lebih lanjut. Ini juga berpotensi untuk memperkuat bagaimana program ini dibicarakan sebagai program keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menfokuskan kepada komunikasi deliberative serta fragmentasi postmodern yang diusung oleh filsuf yaitu Jurgen Bubermas dan Francois Lyotard dalam melihat kasus keracunan MBG di sekolah. Sejauh ini masih minimnya penelitian yang menitikberatkan terkait dengan komunkiasi deliberative dan juga fragmentasi postmodern terkait dengan isu yang lagi maraknya dibicarakan khusus dalam masalah keracunan MBG. Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* atau studi kepustakaan melalui pendekatan analisis wacana kritis dalam mengidentifikasi integrasi kekuasaan dalam diskursus melalui studi kasus keracunan MBG sebagai sebuah fenomena yang konkret.

Tekhnik dalam analisis data yang digunakan berupa koding tematik melalui identifikasi narasi pemerintahan, narasi kritis masyarakat, serta hoaks. Kemudian juga melalui analisis Hubermas dalam mengidentifikasi kegalalan komunikasi deliberative yang tidak inklusif serta tidak transparan. Dan juga menggunakan analisis Lyotard dalam mengidentifikasi fragmentasi naratif melalui narasi lokal dan narasi resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam pembahasan ini dalam temuan mengenai pola komunikasi serta legitimasi epistemologi mengenai kasus keracunan MBG di berbagai sekolah, terlihat bagaimana adanya ketegangan antara rasionalitas komunikatif Hubermas serta pluralitas Lyotard. Temuan dalam tulisan ini menunjukkan adanya ketumpangtindihan mengenai wacana resmi, pengalam korban, serta media lokal yang menghasilkan fragmentasi narasi. Menjadi kekuatan, walaupun ada ruang untuk deliberasi rasional, heterogenitas Bahasa serta skeptisisme mengenai narasi besar, juga melemahkan kemampuan secara kolektif untuk mencapai suatu kesepakatan kebijakan secara efektif.

Diskursus Keracunan MBG Terkonstruksi dalam Ruang Publik Digital Indonesia

Program pangan secara publik khusus berbicara terkait dengan MBG sebenarnya bertujuan untuk mengatasi permasalahan berupa gizi dalam akses pangan. Akan tetapi program tersebut juga dihadapkan dalam beberapa tantangan serta permasalahan yang akut dalam menjaga kestabilitasan serta keamanan pangan dalam ranah operasi skala besar.(Ontran Sumantri Riyanto 2025) Dalam pelaksanaan program MBG di Indonesia yang langsung berhadapan dengan tantangan secara nyata juga berdampak pada signifikansi mengenai aspek tidak hanya sekedar ketahana pangan, akan tetapi juga pada aspek sosial ekonomi, bahkan tata kelola publik. Secara empiris laporan mengenai adanya insiden keracunan pangan telah terjadi di berbagai sekolah yang mendapatkan program MBG tersebut.(Syari, Sulistiawati, and Heriani 2026)

Paparan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 26 September 2025 keracunan dalam MBG terdapat 5.914 jiwa, ini berawal dari bulan Januari hingga September 2025. Melalui rincian jumlah pada korban perbulannya, Januari (94 jiwa), Februari (496 jiwa), April (313 jiwa), Mei (433 jiwa), Juli (380 jiwa), Agustus (1.988 jiwa), September (2.210 jiwa).(Leader et al. 2026) Penyebab utama dalam temuan tersebut berupa terkontaminasinya *Erchericia coli*, *Salmonella spp* serta *staphylococcus aureus* dalam sampel makanan. Melihat temuan tersebut, dipahami sebagai lemahnya kekuatan dalam pengendalian titik secara kritis melalui keamana pangan bahkan ketidaksiapan dalam menfasilitaskan produksi pangan di berbagai sekolah melalui standarisasi serta kehigenisan yang yang memadai.(Syari, Sulistiawati, and Heriani 2026)

Berita melalui *detik.com* korban keracunana MBG berfokus pada daerah Bandung Barat sebagai salah satu jumlah korban tertinggi hingga mencapai 1.333 jiwa serta menurut JPPI berdasarkan berita nasional sudah mencapai 6.452 korban jiwa. Pemberitaan ini disampaikan langsung oleh Presiden RI bahkan pendapat ahli seperti JPPI serta PSPG. Tujuannya untuk penekanan adanya dampak dari keracunan massal juga diserta kurangnya dalam pengawasan Pendidikan serta ahli gizi.(Prameswari 2026) Untuk itu bagaimana cara dalam penanggulangan berdasarkan kasus keracunan berupa MBG, maka diperlukanlah keamanan dalam masalah pangan, harus ada pembentukan melalui Tim Gerak Cepat (TGC) KLB KP pada tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten/kota. Tim tersebut terdiri dari tenaga medis, epidemiolog kesehatan, sanitarian, tenaga laboratorium. Juga harus melibatkan berbagai tenaga dala program atau sektor yang terkait bahkan masyarakat. Mengenai peran Badan POM, ini merupakan suatu tim yang harus sigap dalam penanggulangan kasus kerancunan MBG, ini justru menjadi tanggungjawab multi *stakeholder* berupa dinaskesehatan, badan Pengawas Obat dan Makana (BPOM), kantor kesehatan, Bupati atau Walikota, serta Kementerian Kesehatan.(Christinawaty 2026)

Perspektif Habermas dalam Kegagalan Komunikasi Deliberatif Dalam Krisis Keracunan MBG

Dalam karya besarnya, *The Teori of Communicative Action* (1981) (Jurgen Hubermas 1984), Hubermas mengembangkan teori komunikasi deliberatif yang menekankan pentingnya dialog rasional dalam masyarakat. Tindakan komunikatif merupakan interaksi yang didasarkan pada pengertian bersama yang saling menghormati, bukan pada kekuasaan serta manipulasi. Keabsahan komunikasi menjadi sah jika memenuhi tiga klaim yaitu: *pertama*, kebenaran: suatu informasi yang disampaikan haruslah besifat benar. *Kedua*, kejujuran: niat si pembicara atau subjek

haruslah bersikap jujur, *ketiga* norma: isi dari komunikasi haruslah sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Sehingga komunikasi deliberatif ini dianggap sangatlah penting untuk menciptakan dalam pengambilan keputusan yang rasional dalam masyarakat demokratis. (Tarumingkeng 2024) Bagi Hubermas, proses komunikasi sangatlah berkaitan erat dengan dunia kehidupan. Supersistem performatif universal dari kompetisi linguistik.(Martynenko and Manchul 2024)

Terutama dalam masalah keracunan berupa MBG yang lagi maraknya dibicarakan pada bulan September 2025. Ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi deliberative atas kegagalan terbentuknya ruang public yang mestinya bersifat terbuka, simetris, serta bebas atas paksaan yang tidak terwujud. Sehingga temuan ini melihat bahwasnya kegagalan dalam program seharusnya berupa menjaga keamana pangan dalm bentuk makan gratis, jutsru belum terealisasi secara penuh. Ini tercermin atas kegalalan berupa menurunnya kepercayaan publik terkait dengan pengawasan keamanan pangan, tuntutan public mengenai transparansi serta kuntabilitas, adanya ekpresi emosional secara kolektif yang bisa terpecahnya narasi secara rasioanal, bahkan solidaritas digital lintas wilayah yang masih bersifat reaktif bukan deliberative.

Berdasarkan respon dari BGN terkait dengan keracunan massal tersebut, menyatakan bahwasanya ini merupakan suatu masalah dalam keamanan pangan melalui program MBG justru tidak bisa dianggap ringan, terlebih dikarenakan target dalam penerimaannya sangatlah besar.(Fitriah et al. 2025) Maka berdasarkan respon dari BGN tersebut memang cepat tanggap berdasarkan hasil data dari laboratorium. Akan tetapi ini lebih bersifat hanyalah komunikasi satu arah serta tidak memenuhi prinsip terkait dengan tindakan komunikatif dalam pandangan Hubermas yang lebih mengutamakan pemahaman intersubjektif berdasarkan kepada diskursus public. Sebagaimana dalam hal ini kiurangnya tempat partisipasi public mengenai konsultasi kebijakan atas kasus tersebut, sehingga public hanyalah dijadikan sebagai penerima informasi secara pasif, bukan secara aktif. Oleh sebab itu legitimasi dalam kebijakan MBG bisa saja runtuh seketika tidak diuji secara diskursus sebagaimana dalam demokrasi deliberative yang diusung oleh Hubermas.

Salah satu syarat demokrasi deliberatif yang ditawarkan oleh Hubermas adanya ruang publik deliberatif yang memungkinkan adanya partisipasi dalam menjaga kesetaraan serta dialog secara rasional. Akan tetapi, berdasarkan kasus MBG ruang public digital justru terfragmentasi opini yang tajam. Sehingga komunikasi berdasarkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai MBG gagal dalam menghasilkan narasi secara kokoh serta terpercaya, sebagaimana public lebih cenderung membentuk opini berdasarkan emosi serta praduga yang tidak *fact based*. (Afriaji 2026) Sementara dalam konstruksi opini public yang terfragmentasi, pemerintah justru kehilangan kendali berdasarkan narasi utama public. Sehingga membuat terpecahnya ke dalam kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang gercermin atas kegalalan pada tindakan komunikatif Hubermas. Mestinya haruslah mengutamakan pemahaman intersubjektif bukan hanya sekedar *strategic action* yang bersifat persuasif. (Sarah Pamela 2026)

Walaupun BGN telah menerapkan beberapa strategi atau upaya berdasarkan respon cepat serta transparansi berdasarkan data-data dari laboratorium, akan tetapi publik tetap menuntut adanya akuntabilitas secara substantif, tidak hanya sebagai klrafikasi yang bersifat formal belaka. Kasus dalam MBG ini juga menyoroti bahwasanya kelemahan atas

pengawasan berdasarkan kepada kualitas bahan serta pangan bahkan sanitasi dalam masalah perdapuran, juga menjadi awal dari akar krisis yang justru dapat memperparah keruntuhan kepercayaan public. Berdasarkan perspektif Hubermas ini terlihat bahwasnya legitimasi kebijakan tidaklah bisa dibangun tanpa adanya partisipasi public berdasarkan proses diskursus secara inklusif.(Aden Aulia Rahma, Selly Ranto, Diny Dewi Febrianti 2025)

Maka dari itu, Hubermas membedakan antara rasionalitas komunikatif berbasis dialog dan rasionalitas instrumental berbasis efisiensi. Habermas menegaskan, tindakan komunikatif adalah sebuah konsep untuk menjelaskan bagaimana manusia berinteraksi dan berkomunikasi dalam masyarakat. Tindakan komunikatif berorientasi mencapai pemahaman dan kesepakatan antara individu-individu. Namun, dalam masyarakat berbasis teknologi, orientasi ini sering tergantikan oleh logika sistem yang menekankan efektivitas dan kontrol. Sehingga teknologi berpotensi menggeser rasionalitas dari dialog efisiensi.(Viader Guerrero 2024)

Perspektif Lyotard Melihat Fragmentasi Narasi Dalam Perdebatan MBG

Lyotard memulai dengan menyatakan bahwa dalam masyarakat postmodern, status pengetahuan mengalami perubahan fundamental akibat perkembangan teknologi dan transformasi sosial. Ia menekankan bahwa persoalan utama bukan sekadar apa itu pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan dilegitimasi (dibenarkan) dalam masyarakat. Ia menyatakan *the status of knowledge is altered* artinya, dalam masyarakat postmodern, pengetahuan tidak lagi memiliki dasar legitimasi yang stabil seperti pada era modern. Legitimasi menjadi problem filosofis utama karena perubahan struktur sosial dan teknologi informasi.(Jean Francois Lyotard 1984)

Lyotard menelusuri pengaruh modernitas dalam postmodernitas, dengan menyatakan bahwa postmodern itu sendiri merupakan bagian dari modern. Sehingga menetapkan pendiriannya terkait dengan kebenaran, yang menegaskan bahwasanya postmodernitas sebagai ketidakpercayaan terhadap metanarasi. Dengan metanarasi, bagi lyotard adalah kecenderungan kaum modernis untuk mengesensialkan dan mentotalisasi deskripsi tentang realitas sosial serta kondisi manusia.(Hem Lal Pandey 2024) Dalam karya Lyotard, *La Condition Postmoderne* (1979), dalam buku tersebut menjelaskan bahwasanya bagaimana kondisi pengetahuan dalam masyarakat yang paling maju dalam masalah legitimasi ilmu pengetahuan. Dalam masyarakat premodern, pertanyaan-pertanyaan tersebut seringkali diselesaikan melalui pengetahuan naratif, di mana pengetahuan dibingkai melalui narasi yang secara bermakna menempatkan dalam masalah waktu. Akan tetapi bagi Lyotard, pengetahuan naratif tidak sebanding dengan pengetahuan ilmiah yang muncul di era modern. Sementara pluralitas permainan Bahasa dimungkinkan dalam pengetahuan naratif.(Thought, Romele, and Sebbah 2022)

Jika dilihat dari kasus MBG yang maraknya dibicarakan dewasa ini, narasi dalam media nasional lebih cenderung bersifat optimis serta konstruktif mengupayakan bahwasanya program MBG telah berhasil dijalankan. Akan tetapi menjadi permasalahan utama juga publik merespon isu MBG, bahwasanya adanya unsur kecewa, ketimpangan distribus serta kritikan dalam sistematika proses berjalannya MBG, terutama isu keracunan yang banyak menimpa korban jiwa.(Fikri, Azhar, and Pradana 2025) Sebenarnya program MBG mengalami tiga bentuk mengenai permasalahan terkait dengan komodifikasi yakni: *Pertama* komodifkasi isi, bahwasnya narasi dalam program MBG disebarluaskan berdasarkan kepada media

yang tujuannya sebagai citra poitik serta legitimasi pemerintaha. *Kedua* komodifikasi khalayak, dalam masalah penerimaan manfaat direduksi kepada indikator keberhasilan program, serta yang terakhir berdasarkan komodifikasi tenaga kerja.(Kharisma et al. 2026)

Dalam konteks ini, narasi besar bersifat totaliter secara epistemologis dikarenakan, mengklaim kebenaran universal, mengatur apa yang sah sebagai pengetahuan, menyingkirkan bentuk pengetahuan lain. (Luke O'Sullivian 2023) baginya narasi modern bukanlah netral, akan tetapi mengontrol kebenara. Lyotard menyatakan bahwa dalam masyarakat postmodern, kepercayaan terhadap narasi besar mengalami krisis. Ia menunjukkan bahwa narasi universal tidak lagi mampu menjelaskan keragaman pengalaman manusia. Sebagai gantinya, muncul apa yang ia sebut sebagai petits recits (narasi kecil**)** narasi lokal, kontekstual, dan plural. Lyotard melihat masyarakat kini sebagai kondisi fragmentasi epistemik berbasis narasi kecil, bukan lagi narasi tunggal. (Baier 2024) Dengan ini, tidak ada lagi kebenaran tunggal, tidak ada legitimasi universal, yang ada adalah pluralitas perspektif. Ini merupakan dasar konsep pluralitas bahasa (*language games*).

Jika dilihat dari narasi besar pemerintahan vs narasi kecil public mengenai kasus keracunan MBG, berdasarkan narasi besar pada sektor pemerintahan, ini sebenarnya bersifat totaliter berdasarkan kerangka epistemic yang mengklaim kebenaran universal bahwasanya program MBG bertujuan untuk meningkatkan masalah gizi serta kesehatan khususnya pada peserta didik. Akan tetapi pada kasus keracunan yang terjadi pada beberapa siswa yang menjalani rawat inap, narasi dalam bentuk resmi tersebut tetap juga mengklaim bahwasanya program yang telah dijalankan tetap sukses, tanpa adanya pengakuan mengenai narasi modern bukanlah netral, namun dijadikan sebagai alat kontrol pada kebenaran.(Kharisma et al. 2026)

Seketika berbicara mengenai fragmentasi narasi, tidak ada kebenaran secara Tunggal. Bagi Lyotard masyarakat sebenarnya terfragmentasi berdasarkan narasi kecil, bukan lagi pada narasi bersifat Tunggal. Pada kasus keracunan MBG, jelas membuktikan bahwasnya tidak ada lagi kebenaran secara Tunggal mengenai kualitas program MBG, pemerintahan menyatakan program MBG memiliki manfaat pada masalah penanganan gizi serta ekonomi msyarakat. Sementara kritkus menyuarakan adanya unsur kekhawatiran khusunya pada kualitas pangan, implementasi program serta transparansi mengenai anggaran dana. Sehingga seketika berbicara dalam masyarakat postmodern, memunculkan yang dinamakan degradasi krisis kepercayaan mengenai narasi besar. Ketika kasus keracunan MBG telahterungkap, mengenai narasi secara universal pemerintahan bertujuan untuk kemajuan bangsa, justru tidak memungkinkan lagi bisa dijelaskan berdasarkan keragaman dalam pengalaman manusia. Sehingga narasi yang tadinya bersifat universal tidak mampu lagi menjelaskan keragaman pengalaman manusia.

Munculnya narasi kecil berupa penolakan serta kritikan, ini dijadikan sebagai Ganti yang muncul jika dikaitkan dengan pemikiran Lyotard yang biasa beliau sebut sebagai narasi kecil. Dalam hal ini seperti narasi lokal, kontekstualitas serta pluralitas dari public dalam penolakan pemerintahan. Penolakan dari public bukan hanya sekedar penolakan tanpa sebab, melainkan sebagai salah satu bentuk adanya kekhawatiran pada permasalahan pangan yang dikonsumsi serta kesehatan bagi masyarakat. Inilah sebagai salah satu bentuk penyuaraan dalam bentuk narasi kecil dari kalangan publik.

Implikasi Hubermas–Lyotard untuk Pemulihan Legitimasi Pengetahuan dalam Kebijakan MBG

Hubermas menawarkan teori komunikasi deliberatif yang menekankan pentingnya dialog rasional dalam masyarakat. Tindakan komunikatif merupakan interaksi yang didasarkan pada pengertian bersama yang saling menghormati, bukan pada kekuasaan serta manipulasi. Sehingga komunikasi deliberatif ini dianggap sangatlah penting untuk menciptakan dalam pengambilan keputusan yang rasional dalam masyarakat demokratis. (Tarumingkeng 2024) Bagi Hubermas, proses komunikasi sangatlah berkaitan erat dengan dunia kehidupan. Supersistem performatif universal dari kompetisi linguistik.(Martynenko and Manchul 2024) kebijakan dalam MBG jika didasarkan pada implementasi komunikasi rasioanlitas yang diusung oleh Hubermas, juga seharusnya diperlukan forum dialog yang setara antara pemerintah, masyarakat, ahli gizi serta informan lokal dalam menyusun kebijakan yang bersifat inklusif. Dilihat realitas saat sekarang partisipasi publik dalam MBG hanyalah sekedar simbolik yang hanya dibatasi pada penerimaan program saja, bukan dalam proses penyusunan kebijakan.

Bagi Hubermas komunikasi sangatlah berpengaruh pada ruang publik yang bisa dijadikan sebagai ruang kebebasan dari penindasan, setiap orang diposisikan secara egaliter. Kebebasan dalam berdiskusi tema termasuk isu-isu subersiv. Ruang publik yang bisa dikatakan idela mestinya dipenuhi oleh masyarakat yang saling memahami dalam berkomunikasi, bukan sekedar berfikir secara efisiensi dan efektivitas belaka saja. Dilihat di era sekarang ruang publik justru mengalami krisi akibat digitalisasi, informasi yang beredar sangatlah berlimpah namun dalam penerimaan informasi secara pasti semakin tumpul. Kurangnya berfikir secara kritis serta mudah terjerumus ke arah radikalisme. Sehingga dalam program MBG bagaimana pemulihan legitimasi pengetahuan mestinya memerlukan revitalisasi ruang publik bukan hanya digital, sebagaimana masyarakat bisa mengeluarkan aspirasinya melaui diskursus secara rasionalitas. Intersubjektivitas berdasarkan prinsip ini menegaskan bahwasnaya kebijakan dalam hajat kehidupan banyak orang tidak hanya datang dari satu orang saja, namun melalui diskursus dalam ruang publik yang melibatkan semua lapisan.

Sementara Lyotard menegaskan secara eksplisit, *I define postmodern as incredulity toward metanarratives* artinya, postmodernisme sebagai sikap skeptis atau tidak percaya terhadap metanarasi. Bagi lyotard tidak menerima metanarasi sebagai kebenaran yang bersifat absolut. Postmodernitas mempertanyakan dan menolak metanarasi yang dianggap sebagai kebenaran Tunggal dan universal, sehingga gerakan ini sebagai sebuah gerakan yang mempertanyakan dan menolak metanarasi.(Peter Gratton 2024) sebagaimana Lyotard menolak unifikasi naratif bersifat spekulatif serta emansipatoris dan menawarkan alternatif berupa paralogi. Yaitu adanya pengakuan mengenai pluralitas nararsi yang dijadikan sebagai dasar bagi legitimasi pengetahuan. Berdasarkan konteks kebijakan dalam MBG jika dilihat dari kebijakan yang telah dibangun oleh pemerintahan dibangun berdasarkan narasi besar pemerintah tanpa menghargai pluralitas pengetahuan dari masyarakat berupa gizi lokal, kearifan indigenus serta praktik tradisional maka akan kehilangan legitimasi. Dalam program MBG yang berdampak pada kasus keracunan dikarenakan minimnya partisipasi publik serta tranparansi, lebih dipengaruhi oleh rasionalitas teknis serta kekuasaan politik dibandingkan rasionalitas komunikatif.

CONCLUSION/KESIMPULAN

Diskursus terkait keracunan MBG dalam ruang publik digital Indonesia

menunjukkan wajah dalam isu bukan hanya sekedar suatu persoalan secara teknis, akan tetapi juga problem dalam legiitimasi, kepercayaan, serta pertarungan narasi diantara pemerintah, media, korban, bahkan publik. Ditinjau dalam perspektif Hubermas, permasalahan ini menunjukkan bahwasanya belum terealisasi secara penuh dalam ruang publik yang ideal dikarenakan arah komunikasi masih bersifat pola satu arah. Sementara dalam kerangka Lyotard tanpak jelas adanya fragmentasi narasi kecil yang saling bersaing serta tidak mudah menyatukan dalam satu klaim kebenaran tunggal.

Perspektif Hubermas menjelaskan bahwasnaya kegalalan dalam dalam komunikasi deliberatif pada krisis keracunan MBG terjadi idakibatkan oleh kebijakan lebih banyak dijalankan berdasarkan rasionalitas instrumental dibandingkan rasionalitas komunikatif. Diakibatkan publik tidak diposisikan sebagai mitra dialog yang setara, akan tetapi seringkali hanya sebatas penerima informasi secara pasif. Kondisi berupa inilah yang bisa melemahkan klaim legitimasi dalam kebijakan, sebab kebijakan yang bersangkutan keselamatananak sekolah semestinya haruslah didasarkan melalui transparansi, partisipasi, serta pengujian argumentatif yang lebih terbuka.

Sementara Lyotard menunjukkan bahwasanya perdebatan mengenai MBG bergerak dalam kondisi postmodern yang ditandai runtuhnya metanarasi tunggal. Narasi secara resmi dari pemerintahan tentang keberhasilan program berhadapan dengan narasi pengalaman korban, kritik masyarakat, serta liputan media yang terbentuknya pluralitas makna yang tidak mudah didamaikan. Maka dari itu, legitimasi pengetahuan dalam kebijakan MBG tidak bisa lagi tertumpu pada klaim universal sepihak, malalinkan jutsru harus dibangun berdasarkan pengakuan atas keberagaman pengalaman, konteks lokal, serta kritik publik yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Aden Aulia Rahma, Selly Ranto, Diny Dewi Febrianti, Muzahid Akbar Hayat4. 2025. "Strategi Komunikasi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dalam Menyikapi Kasus Keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) Di Berbagai Daerah." *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science* 3 (5): 564–71.

Afriaji, Muhammad. 2026. "Komunikasi Kebijakan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Publik." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 5 (1): 302–11.

Baier, Christian. 2024. "Narratives of Post-Truth: Lyotard and the Epistemic Fragmentation of Society." *Theory, Culture and Society* 41 (1): 95–110. https://doi.org/10.1177/02632764231162027.

Caraka, Rezzy Eko, Khairunnisa Supardi, Prana Ugiana Gio, Vijaya Isnaniawardhani, Bekti Djatmiko, Rumanintya Lisaria Putri, Amos Lukas, Rung Ching Chen, and Bens Pardamean. 2025. "Using Kolmogorov–Arnold Network and ResNet for Marine Protein Mapping in Support of the Prabowo–Gibran MBG Program." *Discover Sustainability* 6 (1). https://doi.org/10.1007/s43621-025-01880-9.

Christinawaty, Christinawaty. 2026. "Digitalisasi Pelaporan Potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di BBPOM Palembang." *Borneo Nursing Journal (BNJ)* 8 (1): 2732–37. https://doi.org/10.61878/bnj.v8i1.519.

Fikri, Miftakhul, Dimas Akhsin Azhar, and Yoka Pradana. 2025. "Discourse About the News of Makan Bergizi Gratis (MBG) Program on Tiktok." *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5 (5):

1398–1409. https://doi.org/10.53866/jimi.v5i5.940.

Fitriah, Iqbal Maulana, Lulu Nurul Khasanah, and Andi Rosa. 2025. "Fenomena Keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) Pada Siswa Sekolah." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4 (2): 14319–26.

Haikal, Rifky Sandi, M Ade Ilham, Mardhihah Abbas, and Ilham Arifin. 2026. "Pemikiran Filsafat Jürgen Habermas Dalam Mengkaji Kolonisasi Dunia Kehidupan Di Era Digital." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 3 (1): 257–71.

Hari, Yulius, Minny Elisa Yanggah, and Arief Budiman. 2026. "Model Integration of Information Technology in Optimizing the Food Supply Chain of the Free Nutritious Meal (MBG) Program to Reduce Food Waste." *Journal of Applied Data Sciences* 7 (1): 438–57. https://doi.org/10.47738/jads.v7i1.1039.

Hem Lal Pandey. 2024. "An Overview of Theoretical Connections between the Rhetoric of Modernity and Postmodernity." *Journal of English Studies* 6 (July): 9–21.

Jean Francois Lyotard. 1984. *The Postmodern Condition: A Report on Knowlegde*. *Manchester University Press*. Vol. 10. America: Manchester University Press. https://doi.org/10.2307/jj.28833747.5.

Julian, Fajar Prima, and and Khaiqal Pranata. 2025. "The Sustainability Principles in the Nutritious Meal Program: A Study of Environmental Law and Popular Economy Aspects." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1537 (1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1537/1/012024.

Jurgen Hubermas. 1984. *The Theory of Communicative Action Reason and the Rationalization of Society*. America: Beacon Press.

Keith-Jennings, Brynne, Joseph Llobrera, and Stacy Dean. 2019. "Links of the Supplemental Nutrition Assistance Program with Food Insecurity, Poverty, and Health: Evidence and Potential." *American Journal of Public Health* 109 (12): 1636–40. https://doi.org/10.2105/AJPH.2019.305325.

Kharisma, Komang, Putri Maheswari, Gusti Agung, and Alit Suryawati. 2026. "Komodifikasi Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Isi, Khalayak, Dan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Vincent Mosco." *Triwikrama : Jurnal Ilmu Sosial* 11 (10).

Leader, Alvito, Fannaan Karkasa, Ailsa Ayu, Amanda Widuri, Natashya Naufa, Maudy Novita Anggraeni, Zulia Romadoniyah, and Khusnul Khotimah. 2026. "Kasus Keracunan Makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pada Siswa : Tinjauan Nilai Kemanusiaan Sila Kedua Pancasila Dalam Perspektif Keamanan Pangan Dan Tanggung Jawab Negara Faculty of Languages and Arts (FBS), Surabaya State University , Indones." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 3 (2): 922–35.

Luke O'Sullivian. 2023. "Realism, Postmodernism Andas Metanarrative." *Journal of the Philosophy of History* 18 (2): 1872–2610.

Martynenko, Olexander, and Bohdana Manchul. 2024. "Communicative Philosophy of Science: Genesis and Contemporary Trends of Development." *Filosofija, Sociologija* 35 (3): 308–17. https://doi.org/10.6001/fil-soc.2024.35.3.8.

Nur, Aisyah, Devina Novela, Rahma Dona, Mei Arina, Ilmi As, Negeri Syekh, Ali Hasan, Ahmad Addary, and Padang Sidimpuan. 2025. "TRANSFORMASI KONSEPTUAL MASYARAKAT

KONTEMPORER : DIALEKTIKA NEOMODERNISME DAN POSTMODERNISME TERHADAP RASIONALITAS DAN EMANSIPASI SOSIAL DI ERA DIGITAL Universitas Islam Negeri Sjech M . Djamil Djambek Bukittinggi , 4 Universitas Islam PENDAHULUAN Dalam M." *DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement* 4 (1): 299–314.

Ontran Sumantri Riyanto, Mei Rianita Elfrida Sinaga. 2025. "PENEGAKAN HAK ANAK ATAS MAKANAN AMAN DAN SEHAT: STUDI KASUS KERACUNAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DITINJAU DARI TANGGUNG JAWAB NEGARA." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum HAM* 2 (2): 306–12.

Peter Gratton. 2024. "Jean Francois Lyotard." *Stanford Encyclopedia Of Philosophy Archive*. Stanford Encyclopedia Of Philosophy Archive.

Prameswari, A. N.; Susanto, A. 2026. "Analisis Wacana Kritis Respons Presiden Prabowo Subianto Terhadap Keracunan Makanan Pada Makan Bergizi Gratis (MBG)." *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 22 (1): 139–52.

Sarah Pamela, Mulharnetti Syas. 2026. "Komunikasi Pemerintah Dan Fragmentasi Opini Publik Di Media Sosial: Kasus Program Makan Bergizi Gratis." *KHAZANAH MULTIDISIPLIN* 7 (1): 14–34.

Syari, Suci Fitrah, Henny Sulistiawati, and Nia Heriani. 2026. "Food Poisoning Risk Analysis in the Free Nutritional Meal Program in Educational Units Based on the Risk Governance Framework Analisis Risiko Keracunan Makanan Pada Program Makan Bergizi Gratis Di Satuan Pendidikan Berbasis Risk Governance Framework." *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 14 (1): 22–38. https://doi.org/10.21070/jkmp.v14i1.2067.

Tarumingkeng. 2024. "Prof Ir Rudy C Tarumingkeng , PhD." *RACI Model (Responsible, Accountable, Consulted, Dan Informed)*, no. November: 1–20.

Thought, French, Alberto Romele, and David Sebbah. 2022. "Jean-François Lyotard and Postmodern Technoscience Massimiliano," 1–18.

Viader Guerrero, Jordi. 2024. "Beyond the Digital Public Sphere: Towards a Political Ontology of Algorithmic Technologies." *Philosophy and Technology* 37 (3): 1–23. https://doi.org/10.1007/s13347-024-00789-x.

Yusriadi Yusriadi. 2025. "The Impact of Free Nutritious Meal Programs on Food Security: A Systematic Review Yusriadi." *Journal of Indonesian Scholars for Social Research* 5 (1): 92–97.